

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan sektor industri terutama di daerah perkotaan akan membawa dampak terhadap urbanisasi yang pada hakekatnya tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan. Dari satu sisi pemerintah tidak dapat mengimbangi pembangunan kota terutama pemukiman bagi pendatang. Hal ini akan menyebabkan timbulnya permukiman liar di daerah pinggiran atau sekitar pusat-pusat pertumbuhan. Permukiman ini pada umumnya tidak ditata secara rapi oleh mereka, dengan masyarakatnya yang marginal, secara tanpa disengaja maka tercipta semacam kawasan kumuh, masyarakatnya sulit diatur, dan pada umumnya mereka jauh ketinggalan dibandingkan daerah lain, baik dari segi pembangunan maupun dari segi sosial ekonominya. Tentu saja hal ini akan menjadi penghambat dalam pembangunan kota untuk masa akan datang.

Adanya daerah-daerah ini tidak hanya membawa kemiskinan bagi masyarakat tetapi dalam jangka panjang kesenjangan yang bersifat akumulatif ini akan menyebabkan daerah yang pinggiran akan semakin jauh tertinggal sementara yang maju akan tetap maju dengan percepatan yang semakin sulit dikejar. Hal ini karena adanya perbedaan sumber daya manusia, pertumbuhan awal dan hasil pembangunan berjalan yang secara akumulatif mendorong pertumbuhan selanjutnya sehingga akselerasi pembangunan di kedua daerah akan tetap berbeda. Kesenjangan ini cukup berbahaya karena menyimpan potensi konflik kerusuhan dan kecemburuan sosial, munculnya daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah miskin di pedesaan, serta daerah kumuh di perkotaan. Kesenjangan ini hanya dapat diatasi dengan campur tangan pemerintah dengan cara mengontrol daerah tersebut sehingga basis perekonomian menjadi terangkat untuk memacu pertumbuhan dan secara sejajar dengan daerah lain.

Secara teoritis salah satu sebab terjadinya kemiskinan dan kesenjangan adalah kurangnya kepemilikan terhadap faktor produksi dan keterampilan yang

mengakibatkan rendahnya kemampuan memproduksi dan rendahnya pendapatan keluarga.

Untuk mengatasi kesenjangan antara daerah-daerah tertinggal dan maju ini pemerintah melakukan berbagai usaha untuk mengkatrol daerah-daerah tertinggal sekaligus memberdayakan keluarga miskin antara lain dengan memacu pertumbuhan melalui bantuan modal, meningkatkan pendidikan dan keterampilan, memberikan bimbingan dan pelatihan dan lain-lain. Namun usaha-usaha yang dilakukan tersebut belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat pedesaan dan pinggiran kota.

Bertitik tolak dari kenyataan di atas maka perlu adanya penataan yang rasional antara penduduk dan kepemilikan tanah/lahan. Karena tanah merupakan faktor produksi yang paling penting bagi masyarakat, sedangkan saat ini sebagian besar tanah dikuasai oleh perusahaan besar swasta dan pemerintah, maka untuk itu diperlukan kebijaksanaan pemerintah sehingga kepemilikan tanah ini lebih rasional yang memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat berusaha secara lebih baik dengan luas tanah yang cukup.

Diperlukan adanya terobosan dalam bentuk penataan tata ruang lahan untuk dapat mengangkat taraf hidup masyarakat, sehingga pada gilirannya akan dapat sejajar dengan daerah yang sudah maju lainnya. Penataan tata ruang ini dapat dilakukan melalui beberapa alternatif program, misalnya, melalui program pemukiman kembali penduduk atau juga program transmigrasi baik lokal maupun antar daerah.

Program penataan pemukiman penduduk ini harus direncanakan dengan matang sehingga disamping memenuhi tiga syarat kelayakan yaitu (i) layak secara teknis/huni, (ii) layak usaha dan (iii) layak berkembang, juga harus mampu memberikan dampak positif yang maksimal (*multiplier effects*) terhadap penduduk lokal dan daerah sekitarnya. Untuk memenuhi ketiga kelayakan tersebut, maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut sulit untuk memberdayakan masyarakat, akibatnya peningkatan kesejahteraan penduduk juga relatif lamban.

1.2. Tujuan Studi

Tujuan studi Sosial Ekonomi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara riil tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat pada kawasan study antara lain mencakup kondisi sosial, perekonomian, sarana dan prasarana dasar dan potensi ekonomi yang mungkin dapat dikembangkan. Secara terinci tujuan studi sosial ekonomi ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin menggambarkan secara jelas keadaan sosial ekonomi masyarakat, antara lain, kelembagaan sarana dan prasana yang ada, sarana yang dibutuhkan untuk masa datang, perubahan komposisi penduduk, distribusi tingkat pendidikan masyarakat, peluang usaha, kesempatan kerja, distribusi pendapatan.
2. Mengetahui potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah studi.

1.3 Keluaran yang Diharapkan

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan studi sosial ekonomi adalah laporan lengkap yang berisikan identifikasi masalah dan potensi, evaluasi dan analisa serta usulan-usulan kegiatan yang perlu diambil guna menentukan prioritas kebijakan Pemerintah Kota.

Secara spesifik keluaran yang diharapkan adalah dapat memberikan rekomendasi antara lain

- Konsep pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
- Strategi pengembangan antara lain menyangkut: aspek perumahan, pengembangan usaha kecil, restrukturisasi sistem perumahan permukiman, penataan kawasan, sistem transportasi/aksebilitas, serta sarana dan prasarana.

Secara umum keluaran dari laporan studi ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah, antara lain:

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi perumus kebijaksanaan dan mengambil keputusan baik tingkat daerah maupun pusat dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Untuk mengetahui profil sosial ekonomi sebagai bahan pertimbangan penyusunan strategi pembangunan di wilayah studi.
3. Sebagai informasi untuk pengembangan potensi atau pola usaha yang cocok untuk pemberdayaan masyarakat sesuai karakteristik wilayah studi.
4. Sebagai informasi tentang perkembangan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah studi.